

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN BIAYA  
PENUNDAAN LELANG**

**(Studi Kasus Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

**TRI HANDOKO**

**NPM. 1521030291**

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1440/2020M**

## ABSTRAK

*Rahn* merupakan suatu perilaku hukum dan setiap perilaku hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki konsekuensi dari transaksi adalah barang gadai (*al-marhûn*) merupakan jaminan ketika penggadaai harta tidak mampu untuk membayar sejumlah harta yang dipinjam dari *al-murtahin*. Namun pada praktiknya, Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim Bandar Lampung yang memberikan suatu opsi kepada *al-râhin* untuk membayar sejumlah biaya untuk penundaan lelang barang yang dijadikan jaminan, apabila *al-râhin* tidak menginginkan barang jaminannya dilelang oleh lembaga tersebut. Akan tetapi, pembayaran biaya tersebut tidak mengurangi jumlah atau angka uang yang dipinjam dari lembaga Pegadaian Syari'ah tersebut yang menyebabkan masyarakat yang mengatakan bahwa praktik ini merupakan bunga pinjaman dan merupakan riba yang diharamkan karena adanya penambahan sejumlah biaya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran biaya penundaan lelang pada Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pembayaran biaya penundaan lelang tersebut.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*), dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Sumber data yaitu data primer dari wawancara dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian populasi, maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi. menggunakan metode berfikir induktif untuk menganalisisnya.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan wawancara dan analisa secara mendalam adalah bahwa praktik pembayaran biaya untuk penundaan lelang di lembaga Pegadaian Syari'ah memiliki beberapa prosedur yaitu jatuhnya tempo (*cut off*) terjadi pada setiap bulan dan terdapat 3 kali pada setiap bulannya, tepatnya persepuluh hari dari setiap bulan, yaitu pada tanggal 1, 11 dan 21 dengan kesempatan untuk satu kali pembayaran saja dalam waktu 10 hari setelah jatuh tempo. Apabila setelah 10 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo pihak *râhin* tidak mampu mengembalikan hutangnya yang terdiri dari hutang pokok dan *mu'nahnya*, barulah pihak Pegadaian Syari'ah melelang *marhûn* (barang yang dijadikan jaminan).

Dan tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran biaya penundaan lelang adalah diperbolehkan dan halal. Hal ini mengacu dengan beberapa alasan sebagai berikut: *pertama*, jumlah biaya yang dibayarkan untuk penundaan lelang tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk memperpanjang waktu barang yang digadaikan (*marhûn*) berada di dalam penjagaan dan penyimpanan Lembaga Pegadaian Syari'ah baik di dalam berangkas, gudang maupun yang lainnya. Karena berdasarkan peraturan yang berlaku di Lembaga tersebut, barang yang sudah jatuh tempo harus dikeluarkan dari penyimpanan dan penjagaan seperti berangkas dan gudang. *Kedua*, karena pembayaran biaya penundaan lelang sama saja dengan *ujrah* (upah/ongkos) dari suatu *ijârah* (sewa), maka sudah jelaslah hukum dan dasar hukum dari *ijârah* (sewa).

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Handoko

NIM : 1521030291

Jurusan/Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Penundaan Biaya Penundaan Lelang (Studi Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 4 Januari 2020

Penulis,

Tri Handoko

NPM. 1521030291





**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukaramo/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara.

**Nama : Tri Handoko**

**NPM : 1521030291**

**Jurusan : Muamalah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Biaya Penundaan Lelang (Studi Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khumaldi, a'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**

**Pembimbing II**

**Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**NIP. 19820626200901015**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Sketsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Biaya Penundaan Lelang (Studi Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim)**, disusun oleh **Tri Handoko NPM. 1521030291** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 08 April 2020, pukul 14:00 s/d 15:20 WIB** via Aplikasi Zoom Cloud Meeting.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

**Penguji Utama : Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.**

**Pendamping I : Dr. H. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Pendamping II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**Mengetahui**  
**Fakultas Syari'ah**



**Khairuddin, M.H.**

**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً... ٢٨٣

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)... (Q.S. Al-Baqarah (2): 283).<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Suara Agung, 2008), h. 372.



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Sarsih yang selalu berjuang, membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah demi masa depan anaknya dan ibunda Ismunah yang baik, pemaaf, suci hatinya dan yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka.
2. Kakak-kakakku tercinta Kusgianto serta istrinya Levita dan Kusprianto serta istrinya Kesy yang selama penulisan karya ilmiah ini, merekalah memberikan semangat dan motifasi sehingga karya ini selesai.
3. Keponakanku Denasya Azzalia dan Azzahra terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya.



## RIWAYAT HIDUP

Tri Handoko lahir di Teluk Betung Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 April 1997. Terlahir dari pasangan Sarsih dan Ismunah. Anak bungsu dari tiga bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Kangkung Bumi Waras Bandar Lampung (2000-2001).
2. Sekolah Dasar Negeri 3 Kupang Teba Teluk Betung Bandar Lampung (2002-2008).
3. Sekolah Menengah Pertama Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung (2008-2012).
4. Sekolah Menengah Atas Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung (2012-2015)
5. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (2015 hingga sekarang).



Bandar Lampung, 4 Januari 2020  
Penulis,

Tri Handoko  
1521030291



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T, puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Biaya Penundaan Lelang” dapat diselesaikan. Dan shalawat berserta salam disampaikan kepada Rasulullah S.A.W, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Khumaidi Ja'far S.Ag., M.H. selaku pembimbing Akademik I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Keluarga besar Muamalah B angkatan 2015.
8. Rekan-rekan KKN kelompok 82 di Desa Rejomulyo Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Āmīn.

Bandar Lampung, 4 Januari 2020  
Penulis,

Tri Handoko  
NPM. 1521030291



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian .....	5
G. Signifikansi Penelitian .....	6
H. Metode Penelitian .....	6

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori	
1. Ketentuan Umum <i>Rahn</i> (Gadai)	
a. Pengertian <i>Rahn</i> .....	11
b. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	14
c. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	19
d. Akad dalam <i>Rahn</i> .....	25
e. Pemanfaatan <i>Marhûn</i> .....	28
f. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i> .....	34
g. Hak dan Kewajiban <i>Râhin</i> .....	35
h. Batal dan Berakhirnya <i>Rahn</i> .....	36
2. Ketentuan Umum <i>Ijârah</i> (Upah)	
a. Pengertian <i>Ijârah</i> .....	38
b. Dasar Hukum <i>Ijârah</i> .....	41
c. Rukun dan Syarat <i>Ijârah</i> .....	47
d. Macam-macam <i>Ijârah</i> .....	49
e. Batalnya Serta Berakhirnya <i>Ijârah</i> .....	49
B. Tinjauan Pustaka.....	51

### **BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lembaga Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim	
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pegadaian Syari'ah Cabang	



Way Halim .....	52
2. Visi dan Misi Lembaga Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim .....	53
3. Struktur Organisasi Lembaga Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim .....	54
4. Jenis Produk dan Layanan Lembaga Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim.....	58
B. Praktik Pembayaran Biaya Penundaan Lelang di Lembaga Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim.....	62
<b>BAB IV. ANALISIS DATA</b>	
A. Praktik Pembayaran Biaya Penundaan Lelang di Lembaga Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim.....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Biaya Penundaan Lelang di Lembaga Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim.....	70
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Biaya Penundaan Lelang (Studi Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Way Halim)”.

1. Tinjauan, adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>2</sup> Menurut Beni Ahmad Saebani, hukum Islam adalah seperangkat landasan hukum suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W.<sup>3</sup>
3. Biaya, adalah berwujud: benar/nyata; sungguh-sungguh ada.<sup>4</sup> Sedangkan penundaan, adalah merupakan proses, cara, perbuatan menunda.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 5.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.11.

<sup>4</sup>Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, 2007), 430.

<sup>5</sup>*Ibid*, 406.

4. Lelang, adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.<sup>6</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa yang penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana hukum praktek pembayaran biaya penundaan lelang ditinjau dari kaca mata hukum Islam atau fikih muamalah. Dan dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif.**

- a. Menurut penulis, judul ini layak untuk dibahas, karena ada sebagian masyarakat yang memiliki pandangan bahwa pembayaran biaya untuk penundaan lelang merupakan suatu bunga. Oleh sebab itulah, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang status hukum pembayaran biaya yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim.
- b. Mengenai lokasi penelitian, penulis lebih memilih Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim ketimbang cabang yang lainnya di karenakan lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh dengan lokasi penulis menimba ilmu yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- c. Karena judul skripsi ini belum pernah dibahas oleh mahasiswa, oleh sebab itu diperlukan untuk mengkajinya.

---

<sup>6</sup>Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap...*, h. 262.



## 2. Alasan Subjektif.

Ditinjau dari aspek bahasa, judul skripsi ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Mua'malah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Hukum atau aturan-aturan Allah S.W.T yang mengatur antara manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial disebut dengan *muâ'malah*. Menurut Hudlari Bik *muâ'malah* adalah:

الْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

“*Muâ'malah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”<sup>7</sup>

Menurut Idris Muhammad, *muâ'malah* adalah aturan-aturan Allah S.W.T yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>8</sup>

Salah satu perilaku antara seseorang dengan yang lainnya adalah *rahn* (gadai). Secara etimologi *rahn* diartikan dengan:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ إِسْتِيفَاءُهُ مِنْهُ

“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”.<sup>9</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* yaitu firman Allah S.W.T:

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2.

<sup>8</sup>Ahmad Idris, *Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 1

<sup>9</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً... ٢٨٣

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’âmalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)... “ (Al-Baqarah: 283).

Sabda Rasulullah S.A.W:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَ رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>10</sup>

“Diriwayatkan dari ‘Âisyah R.Ah bahwa Rasulullah S.A.W pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi” (H.R Bukhârî).

Akad *rahn* merupakan sebuah perilaku hukum, dan setiap perilaku hukum yang dilakukan oleh subjek hukum maka pastilah ada konsekuensi atau akibat hukum. Berdasarkan pengertian gadai di atas, bahwa barang gadai (*al-marhûn*) merupakan jaminan ketika penggadai harta tidak mampu untuk membayar sejumlah harta yang dipinjam dari *al-murtahin*. Namun pada praktiknya, sebuah lembaga Pegadaian Syari’ah memberikan suatu opsi kepada *al-râhin* untuk membayar sejumlah biaya untuk penundaan lelang barang yang dijadikan jaminan, apabila *al-râhin* tidak menginginkan barang jaminannya dilelang oleh lembaga tersebut. Akan tetapi, pembayaran biaya tersebut tidak mengurangi jumlah atau angka uang yang dipinjam dari lembaga Pegadaian Syari’ah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Karena terdapat pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. VII, No. 1894 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2008), h. 432.

praktik pembayaran biaya penundaan lelang pada Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim tersebut merupakan bunga pinjaman dan merupakan riba yang diharamkan karena adanya penambahan sejumlah biaya. Maka penulis menuangkan penelitian ini dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Penundaan Lelang (Studi Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim Bandar Lampung)”.

#### **D. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada praktik pembayaran biaya penundaan lelang (studi pada Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim Bandar Lampung).

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembayaran biaya penundaan lelang pada Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pembayaran biaya penundaan lelang pada Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik pembayaran penundaan lelang pada Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim Bandar Lampung.



- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik pembayaran penundaan lelang pada Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim Bandar Lampung.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembayaran biaya penundaan lelang dan memperkaya serta memperluas pengetahuan masyarakat umumnya dan mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya. Tidak hanya itu, skripsi ini diharapkan menjadi referensi bagi para akademisi dalam menulis karangan ilmiah, agar proses pengkajian terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai panduan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya dalam praktik *rahn* (gadai) di Indonesia.

## G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini cukup signifikan untuk segera dilaksanakan karena bagaimana diketahui bahwa praktik *rahn* merupakan bagian dari kegiatan muamalat yang sering kali transaksi ini dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu transaksi pembayaran biaya penundaan lelang dianggap oleh masyarakat bahwa transaksi ini termasuk ke dalam praktik riba yang diharamkan, dikarenakan pembayaran biaya penundaan lelang tidak mengurangi pokok hutang/pinjaman dan biaya *mu'nah* (*ijârah*/sewa tempat penyimpanan barang

gadaian). Dan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan di atas.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah yang berlokasi di Pegadaian Syari'ah.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran, Hadis dan wawancara secara langsung kepada manajemen lembaga Pegadaian Syari'ah dan kepada nasabah yang pernah melakukan praktik *rahn* pada lembaga tersebut.

---

<sup>11</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya itu yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis sedang teliti.

## **4. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai lembaga Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim yang terdiri dari 5 orang.

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dari 100, maka diambil 10/15%.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari adalah 5 orang. Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam

---

<sup>12</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian...*, h. 185.

penelitian ini adalah seluruh pegawai lembaga Pegadaian Syari'ah cabang Way Halim yang terdiri dari 5 orang Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>13</sup> Artinya penulis memperoleh informasi langsung dari pihak manajemen lembaga Pegadaian Syari'ah dan nasabah yang bertransaksi dalam pembayaran biaya penundaan lelang.
- b. Observasi adalah melakukan pengamatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.<sup>14</sup> Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (*observasi*) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana kondisi dari lembaga Pegadaian Syari'ah. Sehingga mendapatkan data-data mengenai praktik pembayaran biaya penundaan lelang tersebut.
- c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri tentang subjek penelitian praktik pembayaran biaya penundaan lelang dengan *intens*.

---

<sup>13</sup>Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h 71.

<sup>14</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h 105.



## 6. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengeditan (*editing*), adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi, dan diperbaiki dengan sebenar-benarnya.
- b. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>15</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Dalam analisis kualitatif hubungan antar semantis sangat penting karena peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

---

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), h.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Ketentuan Umum *Rahn*

##### a. Pengertian *Rahn*

Dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi atau mengatasi kesulitan tersebut itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Praktik seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *Rahn*.

Secara etimologi, kata *rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan.<sup>1</sup> *Rahn* dalam bahasa Arab memiliki pengertian *al-tsubût wa al-dawâm* artinya tetap dan berkekalan, ada yang menyatakan kata *rahn* bermakna *al-habs*, artinya tertahan, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya”(QS Al-Muddatsir: 38).<sup>2</sup>

Pada ayat tersebut, kata *rahînah* bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap di tempatnya.<sup>3</sup>

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn*:

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 251.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 576.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h. 252.

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ إِحْتِبَاسُ مَالٍ لَوْفَاءَ حَقٍّ يُمَكِّنُ إِسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

*Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh dengan sempurna darinya.*<sup>4</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi *Rahn* yaitu:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمَكِّنُ إِسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

*Menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang.*<sup>5</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Abdurahman Al-Jaziri:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ, أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

*Menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk melunasi hutang dari harta itu atau sebagainya.*<sup>6</sup>

Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan *rahn* yaitu sebagai berikut:

#### 1) Ulama Mâlikiyah

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”.<sup>7</sup>

Menurut ulama Mâlikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan

<sup>4</sup> Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), h. 86.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. V (Lebanon: Dâr al-Fikr, 1984), h.180.

<sup>6</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Juz. III (Mesir: Al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1969), h. 319.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 252.

(agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang disahkan itu surat jaminannya.<sup>8</sup>

## 2) Ulama Hanafiyah

“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (pihutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (pihutang) itu, baik seluruhnya maupun sebaliknya”.

## 3) Ulama Syâfi’iyah

“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan terhadap hak (pihutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>9</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syâfi’iyah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi.<sup>10</sup>

## 4) Ulama Hanâbilah

“Menjadikan suatu benda sebagai bentuk kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi harganya. Bila yang bersangkutan tidak sanggup membayar hutangnya”.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang *rahn* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

menyerahkan barang yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan suatu hutang kepada pemberi hutang.

## b. Dasar Hukum *Rahn*

Para ulama fikih sepakat bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya, dengan landasan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-quran dan juga dari landasan lain yaitu hadis dan *ijmâ'*.

### 1) Al-quran

Landasan utama diperbolehkannya *rahn* adalah terdapat dalam

Al-quran surat al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

*Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhaninya. Dan, janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>11</sup>

Dalam ayat di atas Allah SWT berfirman “jika kamu dalam perjalanan”, maksudnya adalah sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berhutang sampai waktu tertentu, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis yang dapat menuliskan transaksimu.

Ibnu Abbâs berkata: “atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada kertasnya, atau tintanya, atau penanya, maka hendaklah ada

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 49.



barang jaminan yang dipegang oleh orang yang menghutangkan”. Yang dimaksudkan dengan “penulis” yaitu adalah jaminan yang dipegang oleh orang yang menghutangkan. Firman Allah SWT “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang memberi pinjaman). Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dipegang.<sup>12</sup> Dalam ayat tersebut juga terdapat firman Allah, “namun, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya.<sup>13</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut di atas menunjukkan sebuah bentuk jaminan yang memudahkan bagi setiap orang yang akan berhutang walaupun dalam kondisi tidak menemukan juru tulis untuk menuliskan hutang atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Namun, jika kamu mempunyai orang lain untuk dijadikan saksi, maka orang tersebut harus melaksanakan persaksiannya. Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mâ'idah ayat 106:

وَلَا تَكُنْمُ شُهَدَاءَ لِلَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ١٠٦

*“Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.*<sup>14</sup>

## 2) Al-Sunnah

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ishaq, *Lubâbal-Tafsîr min Ibn Katsîr*, Alih bahasa oleh M. Abdul Ghofur (Bogor: Pustaka Imam Al-Syâfi'î, 2004), h. 569.

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ishaq, *Lubâbal-Tafsîr min Ibn Katsîr*..., h. 469.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 125.

Dibolehkannya *rahn* selain di dalam Al-quran juga dapat didasarkan pada hadis yang berfungsi sebagai penjelas diperbolehkannya *rahn* dalam Al-quran.

Diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari istri Nabi SAW yang bernama ‘Āisyah r.a berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَ رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.<sup>15</sup>

Dari ‘Āisyah r.a berkata: sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi, dan beliau menggadaikannya baju besi (perang) beliau.

Begitu juga dengan hadis lain Anas r.a pernah menuturkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَ أَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.<sup>16</sup>

Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya di madinah kepada orang yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau.

Menurut kesepakatan para ulama fikih, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dan agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalat, maka seorang muslim tetap wajib membayar

<sup>15</sup> Muhammad bin ‘Ismâ’îl Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju’fî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz II, No. 1962 (Beirût: Dâr Ibn Katsîr, 1987), h. 729.

<sup>16</sup> *Ibid*, Juz II, No. 1963, h. 729.

hutangnya sekalipun kepada non-muslim.<sup>17</sup> Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Abû Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنْهُمْ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.<sup>18</sup>

*Dari Abû Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: gadai tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya (ia memiliki hasilnya) dan wajib menanggung kerusakannya”.*

Berdasarkan hadis tersebut di atas dijelaskan bahwa pemilik barang gadai itu masih tetap boleh mengambil manfaat dari barang yang ia gadaikan.

### 3) *Ijmâ’*

Dasar hukum *rahn* selain atas dasar Al-quran dan hadis Nabi SAW, *rahn* juga dituliskan atas dasar *ijmâ’*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *rahn* diperbolehkan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Mayoritas ulama pula berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan.<sup>19</sup>

### 4) Fatwa Dewan Nasional

<sup>17</sup> Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah...*, h.107.

<sup>18</sup> Abû Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqî, *Sunan al-Kubrâ*, Juz. II, No. 1154 (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2009), h. 213.

<sup>19</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.174.

Dalam Fatwa Dewan Nasional No. 25 tahun 2002 *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhûn* (barang) sampai semua hutang *râhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* pada dasarnya menjadi kewajiban *râhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *râhin*.
- d) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhûn*
- f) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *râhin* untuk melunasi hutangnya
- g) Apabila *râhin* tetap tidak melunasi hutangnya, Maka *marhûn* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- h) Hasil penjualan *marhûn* digunakan untuk melunasi hutang, biayaeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- i) Kelebihan hasil jualan menjadi milik *râhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *râhin*.<sup>20</sup>

Ketentuan penutup:<sup>21</sup>

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan praktik *rahn*, terdapat rukun dan syarat *rahn* yang harus dipenuhi. Rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi sahnyanya suatu pekerjaan.<sup>23</sup> Sedangkan syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.<sup>24</sup>

#### 1) Rukun *Rahn*

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prena Media Group, 2013), h. 29.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1226.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 1402.



Rukun-rukun gadai menurut jumhur ulama yaitu:<sup>25</sup>

a) '*Âqid* (orang yang melakukan akad) meliputi:

(1) *Al- râhin* (yang menggadaikan)

Dengan ketentuan orang yang telah dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

(2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai)

Orang yang dipercaya oleh *râhin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (*rahn*).

b) *Ma'qûd 'Alaih* (yang diakadkan) meliputi :

1) *Al- marhûn* (barang yang digadaikan).

Barang yang digunakan *râhin* untuk dijadikan jaminan untuk mendapatkan uang.

2) *Al-marhûn bih* (hutang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *râhin* atas dasar besaran tafsiran *marhûn*.

c) *Shîghat* (ijab dan kabul)

Kesepakatan antara *râhin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi *rahn*.

Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya *shîghat* yaitu pernyataan kesediaan memberi hutang dan

---

<sup>25</sup> Hanif, *Pegadaian dalam Peta Syari'ah*, Asas, Vol. II, No. 4, Juli 2010, h.38.

menerima barang jaminan itu. Selain itu menurut ulama Hanafiyah, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan *al-qabdh* (serah terima) oleh pemberi hutang. Adapun kedua pihak yang melakukan akad barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *rahn*.<sup>26</sup>

## 2) Syarat *Rahn*

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* meliputi:<sup>27</sup>

- a) Syarat *al-râhin* dan *murtahin*: syarat *rahn* yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum. Menurut mayoritas ulama adalah orang yang *bâligh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *bâligh*, tetapi cukup berakal saja.

- b) Syarat *al-marhûn bih* (hutang)

*Marhûn bih* adalah hak yang diberikan ketika terjadinya akad *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu: <sup>28</sup>

<sup>26</sup> Fadlan, *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan, Iqtishadia* Vol. I, No.1, Juni 2014, h. 33.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>28</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permata Net 2016), h.170.

(1) *Marhûn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama Hanafiyah, *marhûn bih* hendaklah berupa hutang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

(2) *Marhûn bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhûn bih* tidak dapat dibayarkan maka telah menyalahi sebab maksud dan tujuan disyariatkannya *rahn*.

(3) Hak atas *marhûn bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhûn bih* tanpa dijelaskan hutang mana menjadi *rahn*.

Menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah syarat *marhun bih* adalah:

- (1) Berupa hutang yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Hutang harus *lâzim* pada waktu akad.
- (3) Hutang harus jelas dan diketahui antara *râhin* dan *murtahin*.

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh *murtahin* di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar hutangnya.<sup>29</sup> Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah:

- (1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan.

---

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, h.196.

- (2)Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara’).
- (3)Barang yang dibolehkan oleh syara’ mengambil manfaatnya.
- (4)Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
- (5)Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang.
- (6)Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- (7)Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- (8)Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya hutang atau lebih.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan adalah:<sup>30</sup>

- (1)Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan, harus pada waktu akad dan dapat diserahkan.
- (2)Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang bernilai.
- (3)Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan.
- (4)Barang harus jelas, ukuran, jenis, jumlah.
- (5)Barang yang digadaikan harus utuh dan tidak terpisah satu sama lain.

c) Syarat penyerahan *marhûn*

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h.198.

Apabila barang jaminan telah diterima oleh *murtahin* kemudian hutang sudah diterima oleh *râhin*, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat yang terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn* adalah penyerahan barang jaminan artinya barang jaminan yang dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Namun para ulama berselisih pendapat dalam serah terima barang jaminan. Mayoritas ulama berpendapat serah terima bukan syarat sah nya akad *rahn*, akan tetapi hanya sebagai syarat *luzûm* akad *rahn*. Maka akad *rahn* itu belum mengikat kecuali dengan terjadinya serah terima barang yang digadaikan. Sedangkan menurut ulama Mâlikiyah tidak sempurna akad *rahn* kecuali dengan adanya serah terima barang yang digadaikan. Oleh karena itu adanya serah terima barang jaminan merupakan kesempurnaan akan *rahn*. Ulama Mâlikiyah menganggap *marhûn* tidak harus diserahkan secara aktual seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat sertifikatnya.<sup>31</sup>

- d) *Shîghat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Sementara akad *rahn* nya sah.

---

<sup>31</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 256.



Sedangkan menurut ulama Hanâbilah, Mâlikiyah dan Syâfi'iyah menyatakan, syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.<sup>32</sup>

#### **d. Akad dalam *Rahn***

Akad merupakan prasyarat yang membedakan antara syari'ah dan non-syari'ah, akad merupakan pintu terbentuknya pernyataan sah atau tidaknya perbuatan muamalah. Dalam *rahn* akad merupakan prasyarat yang menyebabkan gadai dapat diterima secara syar'i. Ada beberapa jenis akad yang perlu diperhatikan dalam *rahn*, agar bentuk transaksinya sesuai dengan hukum Islam.

##### **1) Akad *Tabarru'***

Akad *Tabarru'* adalah akad tolong-menolong yang merupakan ciri dasar pelaksanaannya suatu *rahn*. *Fathi al-Durainî* sebagai ulama ahli fikih dari Damaskus Suriah beliau mengatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang *marhûn* baik oleh *râhin* maupun oleh *murtahin* bertujuan agar kedua

---

<sup>32</sup> Fadlan, *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan...*, h.34.

belah pihak tidak dikategorikan dalam pemakan riba.<sup>33</sup> Alasannya adalah karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan akad yang dilakukannya lebih tepat dengan akad *tabarru'* dan tujuan utamanya adalah *al-ta'âwun 'ala al-birri wa al-taqwâ* (saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwaan).

Akad *tabarru'* pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil dan sangat tepat jika dalam akad *rahn* yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat adalah akad *tabarru'* bukan untuk mencari keuntungan komersil. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan *rahn* permasalahannya yaitu kaum muslim melakukan transaksi *rahn* karena benar-benar membutuhkan dana untuk keperluan pribadi maupun keluarganya, mereka menggunakan harta mereka sebagai jaminan (agunan) karena untuk lebih meyakinkan dan adanya jaminan yang dipegang oleh pihak pemilik modal (*murtahin*).

## 2) Akad *Rahn*

*Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian pihutangnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.114.

<sup>34</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Media Grafika, 2010), h. 229.

### 3) Akad *Ijârah*

*Ijârah* memiliki makna sewa-menyewa. Kalimat *ijârah* berasal dari kata *ujrah* yang artinya upah. Akad *ijârah* merupakan pengambilan manfaat dari dua bentuk yaitu *mu'ajir* (pemilik yang menyewakan manfaat) dan *al-musta'jir* (penyewa atau orang yang membutuhkan barang). Barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'jûr* dan adanya kompensasi atau adanya jasa, biaya yang dikeluarkan disebut *ujrah*.

### 4) Akad *Al-Mudhârabah*

Selain akad *ijârah* dalam pelaksanaan dan praktik yang bisa digunakan dalam *rahn*, bisa juga seorang *râhin* dan *murtahin* menggunakan akad *mudhârabah*. Akad *mudhârabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak *râhin* dengan pihak *murtahin*. *Râhin* menggadaikan tanahnya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Dalam akad *mudhârabah*, pihak pemberi gadai akan memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh *murtahin* dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan dilunasi.

Jika *marhûn* dapat diambil manfaatnya maka perlu ada kesepakatan yang jelas mengenai pemanfaatan *marhûn* berdasarkan akad yang disesuaikan dengan jenis harta benda yang digadaikan. Untuk kesepakatan dalam presentasi bagi hasil dalam keuntungan nisbah maka bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan antara *râhin*

dengan *murtahin*. Selain itu, dapat juga bermakna bahwa pihak *râhin* dan *murtahin* memberikan hasil keuntungan bersama dari hasil tanah yang dikelolanya bila pinjaman *marhûn* yang digadaikan dan uang yang diterima dijadikan modal usaha.

#### e. Pemanfaatan *Marhûn*

Pada dasarnya tidak diperbolehkan terlalu lama dalam memanfaatkan barang jaminan (*marhûn*) sebab hal itu akan menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan *marhûn*, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan *marhûn* yang dijadikan jaminan atas hutang. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian dan penjelasan berikut ini.

##### 1) Kedudukan *Marhûn*

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

##### 2) Pemanfaatan *Marhûn* oleh *Râhin* (yang menggadaikan).

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi

---

<sup>35</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h,181.

tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan pemilik barang jaminan (*agunan*) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu (H.R Dâr al-Quthnî).

Dalam pemanfaatan *marhûn* oleh *râhin*, terdapat beberapa pendapat, yakni di kalangan ulama-ulama Hanafiyyah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan *murtahin*. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.<sup>36</sup>

Sedangkan ulama Mâlikiyah berpendapat hampir sama dengan ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa *râhin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn*. Keizinan *murtahin* terhadap *râhin* untuk memanfaatkan *marhûn* membatalkan akad *râhin*.<sup>37</sup> Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *râhin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn*

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h,258.

<sup>37</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah ...*, h. 256



baik diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan dan tidak lagi hak pemilik secara penuh.<sup>38</sup>

Sementara itu, ulama Syâfi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih luas dari pendapat ulama-ulama sebelumnya, karena pemilik barang itu ingin memanfaatkan *marhûn*, tidak perlu ada izin dari pemegang *marhûn* yaitu *murtahin*. Alasannya barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *marhûn* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab itu apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik barang bertanggung jawab untuk hal itu.<sup>39</sup>

Kendati pemilik barang (*râhin*) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal *râhin* tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari *murtahin* (orang yang memberi hutang).<sup>40</sup>

### 3) Pemanfaatan *Marhûnn* oleh *Murtahin*

Pada asalnya *marhûn*, biaya pemeliharaan dan manfaatnya adalah milik orang yang menggadaikan (*râhin*). *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *marhûn* tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya.<sup>41</sup> Sedangkan menurut ulama terdapat perbedaan dalam menafsirkan pemanfaatan

<sup>38</sup> Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h. 259.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 260.

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 257

<sup>41</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah ...*, h. 258.

*marhûn* oleh *murtahin*. Ulama Mâlikiyah berpendapat bahwa apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila hutang dalam akad gadai tersebut akad jual beli. Bila hutang tersebut adalah hutang *qard*, maka tidak boleh.<sup>42</sup> Sedangkan ulama Hanâbilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.

Akan tetapi, menurut ulama Hanâbilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>43</sup>

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn* baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin *râhin*. Karena *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. Apabila *râhin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhûn* maka ia boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyah, akan tetapi sebagian yang lainnya mengatakan bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan

---

<sup>42</sup> Imam Mustofa, *Hukum Perjanjian Syari'ah ...*, h. 200.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 258.

barang yang digadaikan sekalipun itu diizinkan oleh *râhin*. *Marhûn* hanya berfungsi sebagai *tautsîq bi al-dayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *râhin*. Jika memanfaatkan, kemudian barang rusak maka *murtahin* menanggungnya. Sebagian ulama yang berpendapat melarang adalah dikarenakan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah riba.

Jika disyaratkan kepada *râhin* untuk memanfaatkan barang ketika akad diharamkan karena itu adalah riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba, jika tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah *tabarru'* dari *râhin* kepada *murtahin*.

Ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW “Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berhutang), miliknya keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya”.

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ulama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, baik *râhin* maupun *murtahin* tidak boleh

---

<sup>44</sup> Imam Mustofa, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, h. 201.

mengambil manfaat dari *marhûn*, apabila tidak ada izin terlebih dahulu.

#### 4) Pemeliharaan *Marhûn*

Dengan tetapnya hak menahan *marhûn* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murtahin* berkewajiban memelihara seperti sebagaimana memelihara hartanya sendiri, *marhûn* adalah amanah ditangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadî'ah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *râhin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut diadakan perjanjian pemeliharaan.

*Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain, tidak boleh juga menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka seseorang tersebut wajib menanggungnya. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhûn* apabila jalannya aman.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *râhin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ.<sup>45</sup>

*Dari said ibn al-musayyab, sesungguhnya Rasulullah SAW, berkata: gadai itu tidak menutup pemilik dari memanfaatkan barang gadai, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung kerusakan dan biaya”.*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *râhin* sebagai pemilik barang gadai (*marhûn*) dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *râhin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.

Dalam hal ini *râhin* bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Râhin* tidak boleh mengambil biayaeliharaan *marhûn* dari hasil *marhûn* kecuali atas kerelaan *murtahin* karena *marhûn* semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*.

#### **f. Hak dan Kewajiban Murtahin**

##### **1) Hak Murtahin (Penerima Gadai).<sup>46</sup>**

a) Penerima gadai berhak menjual *marhûn* atau barang yang digadaikan apabila *râhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada

<sup>45</sup> Abû Bakar Ahmad ibn al-Husain Ali Al-Baihaqî, *Sunan al-Kubrâ*, Juz II, No. 1451., h. 424.

<sup>46</sup> Sofiniyah Ghufiron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2007), h. 26-27.

saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman atau *marhûn bih* dan sisanya dikembalikan pada *râhin*.

- b) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhûn*)
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh *râhin*.

## 2) Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai).<sup>47</sup>

- a) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c) *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika hutang nya telah dilunasi.

## g. Hak dan Kewajiban *Râhin*

### 1) Hak *Râhin* (Pemberi Gadai)

- a) *Râhin* berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya
- b) *Râhin* berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *Murtahin*.

---

<sup>47</sup> Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 210.



- c) *Râhin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) *Râhin* berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

2) Kewajiban *Râhin* (Pemberi Gadai).<sup>48</sup>

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutang pinjamannya.

**h. Batal dan Berakhirnya *Rahn***

*Rahn* dipandang berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain seperti penjelasan berikut ini.

1) *Borg* atau Barang Gadaian Diserahkan Kepada Pemiliknya.

Mayoritas ulama selain Syâfi'iyah memandang berakhir akad *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* (*marhûn*) kepada *râhin* sebab *borg* merupakan jaminan hutang. Jika diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *râhin* atau kepada orang lain atas seizin *râhin*.

---

<sup>48</sup> Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islâm Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 41.

## 2) Penjualan *Marhûn*.

Apabila *marhûn* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka, akad *rahn* berakhir. Jika saat jatuh tempo pelunasan hutang, *râhin* belum mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal ini, *murtahin* tidak berhak mengakui atas *marhûn* tersebut, tetapi ia berhak menjual *marhûn* tersebut. Siapa saja boleh membelinya termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas hutang *râhin*. Jika penjualan *marhûn* melebihi hutang *râhin*, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *râhin*. Begitupun sebaliknya, apabila kurang itu menjadi tanggung jawab *râhin*.

## 3) *Râhin* Melunasi Semua Hutang.

Apabila *rahn* melunasi hutang kepada *murtahin* maka akad berakhir.

## 4) *Murtahin* melakukan pengalihan hutang *râhin* kepada pihak lain (*hiwâlah*).

## 5) *Râhin* atau *murtahin* meninggal dunia atau *râhin* bangkrut sebelum *marhûn* diserahkan kepada *râhin* dan hutang dilunasi

## 6) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa izin *râhin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *râhin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *râhin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya

adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan borg kepada *râhin* sampai dijual.<sup>49</sup>

7) *Marhûn* rusak atau binasa. *Marhûn* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamânah* kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut mayoritas ulama.<sup>50</sup>

8) *Rahn* dipandang habis apabila *borg* (*marhûn*) ditasharrufkan, seperti diadakan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain.

## 1. Ketentuan Umum *Ijarâh*

### a. Pengertian Upah (*Ijarâh*)

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>51</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Upah dalam Islam dikenal istilah *ijarâh*, secara etimologi kata *al-ijarâh* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>52</sup> Sedangkan secara istilah *ijarâh* adalah akad pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh

<sup>49</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata di Indonesia...*, h. 190.

<sup>50</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah ...*, h. 269.

<sup>51</sup> Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 15.

karenanya Abu Hanifah mengatakan bahwa *ijarâh* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>53</sup>

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara epistemologi *ijarâh* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarâh*. Kata *ajara-hu* dan *ajru-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.<sup>54</sup>

*Ijarâh* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian *ijarâh* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>55</sup>

*Ijarâh* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarâh* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarâh* adalah manfaat itu sendiri,

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

<sup>54</sup> A Riawan Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2010), h. 145

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.228

bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarâh* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarâh* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarâh* dalam hal ini biasa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarâh* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seseorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pergantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarâh* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarâh* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarâh* hanya ditunjukkan pada manfaat.

Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarâh* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kulliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “karyawan bekerja di toko dibayar upahnya sebulan sekali. Jadi dapat dipahami

---

<sup>56</sup> M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Loging Pustaka) h.180

bahwa *al-ijarâh* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>57</sup>

## b. Dasar Upah (*Ijarâh*)

### 1. Al-quran

Al- Qur'an secara harfiah berarti "bacaan" adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah. Dalam hukum islam pengambilan hukum yang pertama harus berdasarkan Al-Quran.

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa *ijarâh* diisyaratkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarâh* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarâh* diisyaratkan berdasarkan Al-quran, Al-sunnah dan ijma.

a) Al-quran surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبَّ  
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.115



ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".<sup>58</sup>

b) Al-quran surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

"... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>59</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>60</sup>

c) Al-quran surat Al-Nahl ayat 97:

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 140.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.46

<sup>60</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h.350

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

*“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*<sup>61</sup>

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seseorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.<sup>62</sup>

Dalam ayat lain Allah menerangkan bahwa memberikan kebolehan kepada hambanya memakan atau meminum dari Sesutu yang diharamkan apabila dalam keadaan terpaksa. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam surat-surat berikut:

d) Al-quran surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن  
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

*“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)*

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h.740

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Cet 2, 2009), h.610

*melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>63</sup>

e) Al-quran surat Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>64</sup>

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat mendapatkan makanan/minuman dari sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa. Dengan kata lain seseorang yang berada dalam keadaan darurat, yang menyebabkannya harus mengonsumsi sesuatu yang haram, maka ia diberikan udzur untuk melakukannya. Misalnya, orang yang sangat lapar dan tidak ada makanan yang didapatkan kecuali daging bangkai maka dalam keadaan itu.

## 2. Hadis

<sup>63</sup> Ibid., h.26

<sup>64</sup> Ibid., 106

Hadis adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-quran, dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-quran.

Selain itu ayat Al-quran di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).<sup>65</sup>

*“Dari Abdilllah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).*

Diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarâh disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).<sup>66</sup>

*“ Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya” (H.R. Abdul Razaq).*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: اجْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَ أَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009), h. 817.

<sup>66</sup> Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam al-Shan'ani, *Mushannaf Abdul Razzaq*, Juz. VIII, No. 15024 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012), h. 235.

<sup>67</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696..., h.125.

“ Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah Saw dibekam oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan. (H.R. Bukhari).

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>68</sup>

“Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).

### 3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarâh dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>69</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negri besar dan *fuqaha* masa pertama”. *Al-Ijarâh* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran

<sup>68</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Juz. III, No. 2270, *Ibid.*, h. 90.

<sup>69</sup> H. Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: 2010), h.145-

upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>70</sup>

### c. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarâh*)

#### 1. Rukun Upah (*Ijarâh*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>71</sup>

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarâh* ada 4, yaitu:

##### a) *Aqid*

Yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>72</sup>

##### b) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad, terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata.

<sup>70</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117.

<sup>71</sup> Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 117.



Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarâh* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>73</sup>

c) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir*.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fâsid*.<sup>74</sup>

## 2. Syarat Upah (*Ijarâh*)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang harus ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarâh* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku

<sup>73</sup>Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya, TerbitTerang, 2005), h. 178.

<sup>74</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarâh* adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Pelaku *ijarâh* haruslah berakal.
- 2) Keridhaan pihak yang berakad.
- 3) Objek *ijarâh* berupa harta tetap yang diketahui.
- 4) Penjelasan tempat manfaat.
- 5) Penjelasan waktu.

#### **d. Macam-macam Upah (*Ijarâh*)**

1. *Ijarâh* atas manfaat, disebutkan sewa-menyewa. Dalam *ijarâh* bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Contoh: sewa apartemen, sewa tanah, sewa rumah, sewa mobil.
2. *Ijarâh* atas pekerjaan, disebut upah-mengupah. Dalam bagian kedua ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Contoh: guru, buruh, driver jasa transportasi, pelayan dan lain-lain.

#### **e. Syarat dan Batalnya Upah Serta Berakhirnya Akad Upah**

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
2. Mendapat manfaat. Jika *ijarâh* dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada belum selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

---

<sup>75</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

3. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran *ijarâh* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penanguhan pembayaran.

Adapun yang menjadi sebab batalnya upah adalah sebagai berikut:

1. Jika benda ada di tangan *âjir*
  - a) Jika ada bekas pekerjaan, *âjir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
  - b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *âjir* berhak mendapat upah pekerjaannya sampai akhir.
2. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Para ulama' fikih menyatakan bahwa akad *al-ijarâh* akan berakhir apabila:

- a) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarâh* telah berakhir. Apabila yang disewakan benda, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila itu berupa jasa, maka orang yang bekerja tersebut berhak menerima upahnya.
- c) Menurut madzhab Hanafiyah apabila wafatnya salah seorang yang berakad. Sedangkan menurut mayoritas ulama' wafatnya salah seorang berakad tidak mengakhiri akad dan bisa diwariskan.

## B. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Rizka Rebriyanti dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Produk Kredit Cepat Aman (KCA) (Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Cikupa Kabupaten Tangerang).
2. Daffa Ibrahim Rachman dan Safitri Mukaromah dalam jurnalnya yang berjudul “ Implementasi Biaya Ijarah Pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas (Studi Kesesuaian Dengan Fatwa DSN-MUI).
3. Pudji Indah Lestari dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis Penundaan Lelang Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Medan Terhadap Harta Bersama (Studi Kasu Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 PK/Pdt/2007).

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjamah* (Semarang: CV As-Syifa, 2001)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Shahīh al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002.
- Al-Jazirī, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah*. Kairo: Dār al-Hadīts, 2004.
- Abdullah bin Abdurrahman, Al-Basam. *Taudhih al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*. (Jeddah – KSA: Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah. 1995).
- Afandi Yasid M, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Loging Pustaka)
- Al Asqolani Ibnu Hajar, *Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Darun Nasyir Al Misyriyyah)
- Al-Albani Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Al-Hajj Ibnu Muslim Al-Husain Abi Imam, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Maraghi Mustofa Ahmad, *Tafsir Al-maragi*, Cet 1 (Semarang: CV Toha Putra, 1984)
- Al-Syalabi Mushthafa Muhammad, Ta'li Al-Ahkam (Mesir: Dar Al Nahdoh Al Arabiyah)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013)
- Ash-Shiddieqy Hasbi Muhammad, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001)
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a Anha*. (Riyadh – KSA : Dar Balnasiyah. 1997).

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Bukhori Imam, *Shahih Al-Bukhori, Jilid 4* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)

Chaudhry Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2016)

Dahlan Rahman Abd H, M.A., *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: 2010)

Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Wacana Ilmu, 2000)

Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul, 2004)

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Fakultas Teknologi UGM, (Yogyakarta: UGM Press, 1986)

Haq Abdul, *Formulasi Nalar Fiqih* (Surabaya: Khalista, 2006)

-----, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Haroen Nasrun, *Ushul Fikih I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996)

Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Hidayat Syarifudin dan Sedarmayanti, *Metodologi penelitian* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002)

Arne Huzaemah dan Syaiful Aziz, Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom Pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah, *Al-Adalah*, Vol. XV, No. 01 (Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2018), (Online), Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3383/2471>, diakses pada 28 Maret 2019. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Karim, Syafi'i A, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Khallaf Wahab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)